

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

SKRIPSI



OLEH :

RAIHAN RIFKY IMANI
NBI : 1312000210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

SKRIPSI



Oleh:

Raihan Rifky Imani

1312000210

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

SKRIPSI



Oleh:

Raihan Rifky Imani

1312000210

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

RAIHAN RIFKY IMANI

NBI : 1312000210

Dosen Pembimbing :

Dipo Wahjocono, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310880149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

Oleh:

RAIHAN RIEKY IMANI

1312000210

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultats Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 3 Juli 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130613

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H.

NPP/NIP: 196606181991031002

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130612

Mengesahkan,

Fakultats Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC

NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raihan Rifky Imani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Raihan Rifky Imani

NBI 1312000210

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raihan Rifky Imani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

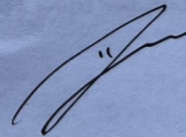
Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya,
30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Raihan Rifky Imani

NBI 1312000210

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Rifky Imani

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Raihan Rifky Imani

NBI 131200021

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Rifky Imani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Raihan Rifky Imani

NBI 1312000210



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Rifky Imani
NBI : 1312000210
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHALANGAN
HAK MEMILIH KARYAWAN DALAM PEMILU**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan,
mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap
tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 30 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Raihan Rifky Imani

NBI 1312000210

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya kepadanya Allah Subhanahu Wata'ala,
Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Serta teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, mempermudah dan memperlancar dalam mengerjakan skripsi
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memudahkan perizinan penelitian ini.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum
4. Dipo Wahyoeno Hariyono S.H.,M.H. Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Orang tua saya yang telah mendoakan, memberikan dukungan dari awal masuk kuliah hingga sampai detik ini dan telah, dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman sehoobi saya yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
7. Sahabat saya Mahendra, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun

tidak langsung selama proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

ABSTRAK

Hak pilih karyawan dalam pemilu merupakan aspek penting yang menyoroti partisipasi politik warga negara dalam konteks demokrasi. Hak ini tidak hanya mencerminkan keberagaman dan inklusivitas dalam sebuah negara demokratis, tetapi juga menjadi pengekspresian penting dari hak dasar setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pentingnya melindungi hak pilih karyawan dari potensi risiko atau tekanan yang mungkin berasal dari pimpinan perusahaan mencerminkan dinamika kompleks antara kepentingan bisnis dan partisipasi politik karyawan. Sambungan antara kepentingan bisnis dan partisipasi politik karyawan dapat menimbulkan isu-isu etika yang menuntut pertimbangan mendalam, di mana keberlanjutan bisnis dapat bertentangan dengan hak demokratis individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pimpinan perusahaan terkait perlindungan hak pilih karyawan dalam pemilihan umum serta sanksi apa yang diberlakukan terhadap pimpinan perusahaan yang melanggar hak pilih karyawan dalam pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan bertanggung jawab dalam hal moral dan hukum untuk melindungi hak pilih karyawan dalam pemilu. Mereka harus memastikan bahwa setiap karyawan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi. Adapun sanksi yang dikenakan perusahaan berupa sanksi pidana, perdata, dan sanksi administratif. Perusahaan diharapkan bisa memperbaharui kebijakan internal yang jelas dan tegas untuk melindungi hak politik karyawan. Pimpinan harus aktif mengedukasi staf tentang pentingnya hak pilih dan dampak hukum dari penghalangannya. Selain itu, perusahaan harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi karyawan yang mengalami atau menyaksikan pelanggaran selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran dengan serius. Penerapan sanksi yang adil dan konsisten, baik pidana, perdata, maupun administratif, harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran semacam ini tidak terulang dan menjaga integritas demokrasi dalam lingkungan kerja.

Kata Kunci: Hak Pilih, Ketenagakerjaan, Pemilu.

ABSTRACT

Employee suffrage in elections is an important aspect that highlights the political participation of citizens in a democratic context. This right not only reflects diversity and inclusiveness in a democratic state, but is also an important expression of the fundamental right of every individual to participate in the political process. The importance of protecting employee voting rights from potential risks or pressures that may come from company leaders reflects the complex dynamics between business interests and employee political participation. The connection between business interests and employee political participation can raise ethical issues that demand deep consideration, where business sustainability can conflict with individual democratic rights. This research aims to find out how the responsibility of company leaders related to the protection of employee voting rights in general elections and what sanctions are imposed on company leaders who violate employee voting rights in general elections. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study show that the Company is responsible in terms of moral and legal to protect employee voting rights in elections. They must ensure that every employee can exercise their right to vote freely without pressure or intimidation. The sanctions imposed by the company are criminal, civil, and administrative sanctions. Companies are expected to update clear and firm internal policies to protect employees' political rights. Leaders must actively educate staff about the importance of voting rights and the legal repercussions of obstructing them. In addition, companies must provide a safe and confidential reporting mechanism for employees who experience or witness violations. In addition, the government must conduct strict supervision and follow up on any reports of violations seriously. The application of fair and consistent sanctions, whether criminal, civil, or administrative, should ensure that such violations are not repeated and maintain the integrity of democracy in the workplace.

Keywords : *Voting Rights, Employment, Elections.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode pendekatan masalah.....	9
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum	11

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Hak Pilih Dalam Pemilu.....	17
1) Jenis Perlindungan Hukum	20
2.2 Perlindungan Hukum Hak Pilih Karyawan	32
2.3 Sanksi Bagi Pimpinan Perusahaan Yang Melanggar Hak Pilih Karyawan	38
2.4 Tanggung Jawab Pimpinan Perusahaan Dalam Memastikan Hak Pilih Karyawan.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....	49
3.1 Tanggung Jawab Pimpinan Perusahaan Terkait Perlindungan Hak Pilih Karyawan dalam Pemilu	49
3.1.1 Hak Karyawan dalam Pemilihan Umum	49
3.1.2 Tanggung Jawab Pimpinan Perusahaan Terkait Perlindungan Hak Pilih Karyawan dalam Pemilu	56
3.2 Sanksi Bagi Pimpinan Perusahaan Yang Melanggar hak pilih karyawan dalam pemilu.....	61
3.2.1 Sanksi Terhadap Pimpinan Perusahaan Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	60
3.2.2 Tata Cara Laport Atas Pelanggaran Hak Pilih Karyawan	73
PENUTUP	74
4.1 KESIMPULAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76